

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

TGUPP Bikin Kacau Pembangunan

Gambir, Warta Kota

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menegaskan bahwa semua anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta tidak boleh bekerja lagi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Hal tersebut harus dilakukan sesuai masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berakhir pada 16 Oktober 2022. "TGUPP itu harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta. TGUPP harus selesai tanggal 16 Oktober nanti. Selesai semua," ujar Prasetyo, Selasa (13/9).

Menurut Prasetyo, banyak gagasan TGUPP yang justru malah merugikan warga DKI Jakarta. Salah satunya adalah pembangunan serta revitalisasi trotoar yang ternyata memutus tali air. Prasetyo beranggapan bahwa hal itu mengakibatkan jalanan menjadi tergenang.

"Ide-idenya banyak yang merugikan. Salah satu contoh yang saya temukan di Kemang, Jakarta Selatan," ujar Prasetyo. Lebih lanjut Prasetyo menjelaskan, tali air tersebut ditambah dengan trotoar yang dilebarkan.

Ia menemukan ternyata tali air itu tidak menyatu dengan trotoar, sehingga menyebabkan kebuntuan. Hal itulah yang menurut Prasetyo menjadi penyebab banjir.

"Pengangkatan TGUPP di zaman Anies dan Jokowi sebelumnya berbeda. Anies mengangkat TGUPP disertai dengan kepentingan. Sementara, Jokowi menunjuk orang menjadi anggota TGUPP dari ASN-ASN yang akan pensiun," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan bahwa jum-

lah anggota TGUPP Anies pun melonjak. Menurutnya, hal itu sangat membebankan anggaran daerah karena mereka (TGUPP) digaji dari APBD DKI Jakarta.

"Banyak orang-orang pintar di sini kok. Jadi saya rasa TGUPP nggak akan saya laksanakan dalam rapat banggar, (gaji TGUPP) nggak kami anggarkan setelah pelantikan pejabat gubernur nanti," ujar Prasetyo.

Prasetyo menegaskan Anies dilarang membuat kebijakan strategis mulai 13 September sampai 16 Oktober 2022. Ia juga meminta Anies tidak melantik pejabat Pemprov DKI hingga masa jabatannya berakhir.

"Untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat dalam memperlancar program pembangunan dan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini kami mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pratama," ujarnya.

Sementara, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah, memastikan masih dapat membuat kebijakan strategis hingga lengser pada 16 Oktober mendatang.

Yayan mengungkapkan, rapat paripurna yang digelar hari ini merupakan rangkaian administrasi pengusulan pemberhentian gubernur. Adapun kewenangan Anies sebagai kepala daerah tidak akan berubah dari 13 September-16 Oktober 2022.

"Paripurna hanya sebagai rangkaian proses administrasi untuk pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak ada kewenangan yang berubah atau berkurang, semua masih sama," mengutip keterangan resmi Yayan Selasa (13/9).

Menurutnya, tidak ada pengaturan mengenai tugas dan wewenang Gubernur selama satu bulan masa jabatan berakhir sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (m36/m35)